

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

*Labor trafficking* merupakan kejahatan transnasional yang membutuhkan kerjasama antar negara dan aktor dalam melawan dan menekan kejahatan tersebut secara efektif. Thailand sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dengan *human trafficking* termasuk *labor trafficking* mendapatkan banyak tekanan dari pihak internasional untuk dapat merespon kejahatan tersebut secepatnya. Thailand telah berupaya dalam merespon *labor trafficking*, namun kejahatan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun tidak ada data pasti yang menunjukkan seberapa banyak yang menjadi korban *labor trafficking* namun dari beberapa penelitian dan laporan yang dikeluarkan oleh NGO dan aktor lainnya menunjukkan fenomena *labor trafficking* di Thailand mengalami kenaikan dengan angka yang cukup besar. Pemerintah Thailand sendiri telah berupaya mulai dari pengadopsian kerangka hukum dari UNTOC, melakukan kerjasama di lingkup regional melalui MoU, COMMIT, dan ACTIP, serta secara aktif mendukung dan berkolaborasi dengan NGO terkait untuk melakukan penelitian dan tindakan pencegahan lainnya terhadap *labor trafficking*.

Konsep *policy failure* membuktikan bahwa penyebab meningkatnya *labor trafficking* di Thailand diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibentuk Thailand mengalami permasalahan yang dianalisis melalui tiga indikator diantaranya *policy as process*, *policy as programs*, dan *policy as politics*. Dalam kasus ini, pemerintah Thailand mengalami permasalahan pada indikator *program* dan *politics*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan MoU yang dibentuk

pemerintah Thailand tidak berhasil dalam mengatur arus migran, dan merugikan kelompok migran tersebut. Selain itu Prayuth sebagai perdana menteri Thailand yang memimpin gerakan dalam melawan *human trafficking* tidak mendapatkan keuntungan terhadap pemilihan umum pada 2023 melalui kebijakan yang dibentuk. Pemerintah Thailand juga kesulitan dalam mengurus permasalahan yang ditimbulkan oleh MoU, permasalahan tersebut memberikan dampak yang menyebabkan banyak dari calon migran tersebut lebih memilih untuk melewati jalur ilegal. Langkah Thailand dalam melakukan penutupan perbatasan dalam menanggapi COVID-19 menyebabkan banyak migran yang bekerja sebelumnya terdaftar “menghilang” dengan status tidak bekerja dan mengharuskan Thailand mencari tindakan cepat dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja migran yang sangat dibutuhkan perekonomian Thailand.

Melalui konsep *Policy failure* ditemukan bahwa kebijakan yang dibentuk Thailand menyebabkan arus migran ilegal di Thailand menjadi tidak teratur dan tidak terkontrol. Permasalahan migran ilegal telah menjadi faktor utama terjadinya *labor trafficking*, hal tersebut dikarenakan migran legal maupun ilegal merupakan kelompok yang rentan terhadap kejahatan *labor trafficking*. Namun migran ilegal menjadi kelompok sasaran utama bagi pelaku *labor trafficking*, dikarenakan status mereka yang tidak jelas, tidak adanya dokumen perjalanan, ketakutan terhadap deportasi, kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak hukum yang berlaku bagi mereka, perbedaan bahasa, dan akses yang terbatas terhadap lembaga otoritas maupun orang-orang yang berada diluar lingkungan pekerjaan mereka.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan diatas, peneliti berharap bahwa pemerintah Thailand dapat secara efektif menyadari kegagalan yang terjadi pada kebijakan yang telah dibentuk agar upaya yang dilakukan oleh Thailand dalam melawan *labor trafficking* dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan *labor trafficking* merupakan kejahatan yang tidak hanya berdampak terhadap individu, namun juga dapat berdampak terhadap negara dan juga dunia internasional. Peneliti sadar akan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, dan diharapkan untuk peneliti yang selanjutnya meneliti topik yang sama, agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam. Terutama menggunakan data-data primer agar dapat menjelaskan fenomena secara aktual dan tepat agar menghasilkan sebuah temuan yang dapat memberikan pengetahuan terhadap pemerintah dalam melawan *labor trafficking*, terutama negara Thailand.

